



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 13 (Tiga belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 12 September 2024
Waktu : Pukul 11.03 s.d. 11.43 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
- Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A.
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Nasdem)
- Acara : Pembahasan terkait:
1. Penyesuaian Rencana Kerja dan ANggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran; dan
2. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
15 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)**
2 dari 12 orang Anggota
 1. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 2. Ir. Harris Turino, M.Si., S.H.
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**
4 dari 8 orang Anggota
 1. M. Sarmudji, S.E., M.Si
 2. Doni Akbar, S.E., M.M
 3. Trifena M. Tinal, B.SC
 4. Drs. H. Dadang S. Muchtar
 - 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)**
2 dari 7 orang Anggota
 1. Andre Rosiade

2. Khilmi

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

2 dari 5 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

1 dari 6 orang Anggota

1. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

0 dari 5 orang Anggota

-

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 4 orang Anggota

2. Amin AK, M.M
3. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Dr. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Abdul Hakim Bafagih

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN:

Menteri Investasi/Kepala BKPM RI (Rosan P. Roeslani) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kita mulai ya, Pak Menteri.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*



**Yang terhormat Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Menteri
Investasi, Kepala BKPM RI, Bapak Roslan Perkasa Roeslani, beserta
jajaran,**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia. Oh, sama ya? Oh iya, iya.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh, oleh 7 orang dari 4 fraksi dengan anggota izin sebanyak 13 orang. Karena itu, kita skors rapat mungkin 5 menit atau 10 menit, baru kemudian kita lanjutkan kembali.

Dengan demikian, rapat saya skors.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 11.05 WIB)

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 11.09 WIB)

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia atas kesediaan waktunya menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan rapat, agenda pada hari ini untuk membahas mengenai penyesuaian:

1. Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran; dan
2. Topik lain-lain yang dianggap perlu.

Tapi, kalau bisa yang berkaitan dengan anggaran, ya.

Untuk itu, kami juga ingin mendapatkan persetujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 12.30? Mudah-mudahan ini nanti, 12.30 ya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Bapak-Ibu dan Hadirin sekalian,

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor B/1127/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024, perihal: Penyampaian Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025, maka dapat kami sampaikan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga dari Badan Anggaran sebagai bahan penyempurnaan RKA K/L, mitra kerja Komisi VI Tahun Anggaran 2025, Kementerian Investasi/BKPM RI ditetapkan sebesar Rp681.880.000.000,00.



Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk dapat segera menyampaikan rencana kerja anggaran kementerian dengan rincian per program untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan, selambat-lambatnya hari ini, tanggal 12 September 2024.

Terkait dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia untuk menyampaikan tanggapannya terhadap penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2025, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Kami persilakan kepada, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI RI/KEPALA BKPM RI (ROSAN PERKASA ROESLANI):

**Kepada yang terhormat Pimpinan, dan juga
Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota Komisi VI DPR RI yang saya muliakan,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam rangka Rapat Kerja dengan agenda Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi VI DPR RI yang senantiasa memberikan dukungan dan juga *support*-nya dalam rangka usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 September 2024.

Ya tentunya, dengan, dengan apa, rencana pagu anggaran yang sudah disampaikan, kami akan segera menyesuaikan, walaupun secara garis besar program dukungan manajemen dan juga program penanaman modal akan kita sesuaikan dengan pagu anggaran 2025 sebesar 681.880.285.000. Kami akan segera menyampaikan secara lebih terperinci lagi pada hari ini. Kami juga tentunya mengucapkan terima kasih atas hasil pembahasan dari Badan Anggaran yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi VI DPR RI.



Mungkin, demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, kami sampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi, santi, santi om,

KETUA RAPAT (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih kepada Saudara Menteri Investasi/Kepala BKPM RI.

Sekarang dengan hadirnya satu fraksi lagi, maka kita sudah kuorum fraksi, sesuai Tatib ya, DPR RI pada Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 276 Ayat (1).

Saya persilakan kepada Anggota Komisi VI yang ingin memberikan pendalaman.

Pak Amin, silakan.

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Pak Menteri,**

Sekaligus, *nih*. Salam kenal, Pak Menteri. Saya Amin dari Fraksi PKS.

Dan semua jajaran Kementerian Investasi BKPM RI yang saya hormati,

Eh, saya enggak komen soal anggaran, *gitu kan*, karena ini soal anggaran, *kan*, saya kira bukan saja menjadi keprihatinan Kementerian, tapi juga kita juga kaget, Pak. Bagaimana lagi, ya? Ya cuma kita bisa berdoa, *gitu ya*. *Insyallah* hari depan lebih baik, *gitu ya*. Harapannya begitu.

Mungkin saya menyampaikan hal yang lain, Pak, ya. Yang ini menjadi isu hangat, bukan saja akhir-akhir ini, tapi juga sudah cukup lama, minimal beberapa tahun belakangan ini. Kalau melihat capaian investasi secara jumlah, *gitu ya*, Pak, target, saya kira sejauh ini Kementerian Investasi cukup bagus. Termasuk tahun ini pun kalau saya lihat juga ada apa namanya, untuk periode yang sama dibanding tahun lalu, juga ada peningkatan, walaupun masih 67% ya, sampai kuartal kedua ini, atau kalau yang dibandingkan dengan targetnya Pak Presiden, kalau *enggak* salah masih 50%-an *gitu*.

Isu yang paling penting tentu bagaimana target-target investasi yang, yang bisa dipenuhi dengan baik itu, dari sisi jumlah, itu bisa, apa, paralel dengan penyerapan tenaga kerjanya, Pak. Ini isu yang paling hangat, kalau saya *mbaca* tahun 2022, Pak. Capaian investasi di atas 100%, tapi pada

tahun itu, ada penyerapan tenaga kerja dari investasi cuma 1 juta orang, sementara PHK baik yang sukarela maupun yang terpaksa *gitu* ya. Maksudnya terpaksa itu memang yang *bener-bener* diberhentikan, yang sukarela terpaksa, harus mengundurkan diri ada 1,6 juta orang. Nah, ini kan tentu menjadi PR kita bersama.

Dan hari-hari ini kita nih, ya masih mendengar langsung PHK yang terus beruntun terjadi di banyak perusahaan akibat masuknya produk-produk impor yang begitu deras, *gitu* ya. Walaupun ini tentu menjadi PR-nya Kementerian Perdagangan, salah satunya, tapi dampaknya ya menjadi tugas Kementerian Investasi. Bagaimana investasi yang ada, investasi yang masuk, baik PMDN maupun PMA itu benar-benar apa ya, kalau kita bisa lebih berorientasi padat karya mungkin juga tidak harus sepenuhnya begitu, tapi benar-benar mempertimbangkan faktor ini, sehingga serapan tenaga kerja itu bisa maksimal.

Kemudian isu yang kedua, Pak. Ini yang juga lagi hangat hari-hari ini, tentang menurunnya jumlah kelas menengah, Pak, dan ini rentan menjadi orang miskin. Karena sejauh ini, menurut penilaian banyak ahli ya, kebijakan pemerintah itu lebih fokus pada 20% kelompok masyarakat terbawah dan 10% kelompok ekonomi teratas. Jadi, kelas menengah ini kurang menjadi perhatian.

Setidaknya ada lima kebijakan ya, yang pemerintah *nih* yang sangat berdampak bagi kelas menengah dan menggerus daya beli mereka. Yang pertama, kenaikan PPN, baru-baru ini *kan*, naik menjadi 12%. Yang kedua, ini masih, masih berencana, pembatasan BBM bersubsidi per 1 Oktober. Yang berikutnya, ini ya juga ramai di media, penyesuaian subsidi KRL, ya pada 2025 ini. Kemudian juga iuran dana pensiun tambahan. Juga ada asuransi TPL kendaraan yang rencana diberlakukan mulai Januari 2025. Ini *kan* semua *nyasar* mengenai kelas menengah, Pak. Dan kalau kita lihat jumlah data BPS ya, tahun 2019 jumlah kelas menengah kita 57 juta sekian. Per hari ini kurang lebih tinggal 47 juta. Berarti *kan*, ada penurunan 10 juta orang dan ini terancam menjadi meningkatkan ke, apa namanya, kelompok orang miskin. Dan ini tentu saja juga menjadi PR dari Kementerian Investasi.

Saya kira itu, Pak Martin, apa yang saya sampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Makasih, Pak Amin.

Kita ke Pak Khilmi.

F-P.GERINDRA (H. KHILMI):



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Ketua Komisi VI, beserta Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri Investasi, beserta jajarannya,**

Jadi, harapan saya ini, Pak Ketua. Dari dulu *tuh kan*, selama Pak Bahliil menjabat ini *kan* anggaran itu meningkat tajam. Nah, takutnya ini nanti di masa Pak Rosan ini *kan* turunnya sangat besar juga, ini, anggaran ini. Takutnya capaian-capaian investasi yang akan ke Indonesia ini takutnya menurun gitu loh. Padahal target dari Pemerintah ini *kan*, industrialisasi di Indonesia ini *kan* ditingkatkan. Harapan saya di tahun ini, mohonlah diperjuangkan untuk tambahan alokasi untuk Kementerian Investasi dan BKPM ini.

Kemarin, *kan* banyak kementerian bermitra dengan Komisi VI ini, anggarannya itu dipotong. Jadi, berangkatnya bisa, pulang *enggak* bisa, *gitu loh*. Jadi, nanti takutnya *kan* nanti penugasan-penugasan dari deputi-deputi ini bisa berangkat, pulang *enggak* bisa pulang, *gitu loh*. Nanti kalau *enggak* bisa pulang, *kan* *enggak* bisa bawa investasi ke Indonesia.

Dan ke depan, Pak Menteri, saya kemarin *kan* kunjungan ke Thailand. Jadi, di Thailand itu dengan perkembangan, apa, IT, itu tidak mengurangi lapangan kerja, misalnya taksi *agrometer*. Itu di sana itu walaupun ada aplikasi yang *kayak* di Indonesia, itu taksi itu masih bisa berjalan dengan baik, *gitu loh*. Masih banyak taksi-taksi yang pakai meteran itu.

Terus yang kedua, dengan tumbuhnya aplikasi baru, misalnya di mal-mal atau di pembayaran tol. Kalau di sini *kan*, kalau diganti aplikasi dengan IT, lapangan kerja tertutup, padahal aplikasi itu *kan* kadang-kadang yang memiliki dua orang. Dia apa, *kayak* Jasa Marga mungkin, ya *mbayarnya kan* sama. Kalau di Thailand itu, kita walaupun pakai *e-toll*, tapi di situ itu masih ada penjaga orang di situnya itu, gardunya itu. Tapi, di sini *kan* di *hilangin* semua, padahal sumber daya manusia di Indonesia ini *kan* sangat besar sekali. Sampai-sampai itu *loh*, Pak di Thailand itu di Sekolah Dasar atau SMP itu, udah berjajar 10 bendera negara ASEAN. Terus saya tanya, "*Kenapa kok* 10 bendera negara ASEAN ini berdiri". Dia bilang, "karena kita satu di negara ASEAN ini sudah satu hamparan, tidak ada batas". Barang Indonesia masuk ke Thailand 0%. Orang Thailand mau bekerja di Indonesia juga tanpa prosedur yang repot, pajak-pajak juga sama, *gitu loh*. Tapi kita ini *kan*, menyiapkan sumber daya manusia di Indonesia ini *kan*, belum ada *kayak gitu*.

Investasi juga *gitu*, pameran misalnya, di bawah ini ada pameran, di atas ini sudah perizinan, misalnya BKPM satu atap. Kalau di sini *kan* satu atap, masih ada nanti perizinan di kabupaten, kadang-kadang di provinsi. Jadi, *kan* sangat lama,. Orang itu *ngajuin* mau investasi ke Indonesia bisa 1 bulan apa 3 bulan, 4 bulan tentang perizinan *aja*. Tapi, kalau di Thailand itu, di bawah ini pameran, di gedung atasnya ini sudah perizinan. Jadi, dia naik itu mau investasi apa, itu udah terlayani, *gitu loh*.

Terus tentang industri hulu, di Thailand itu tidak ada industri hulu, karena sumber daya alamnya tidak ada, Pak. Tapi, yang dimiliki *dia kan* cuma lahan untuk kawasan industri. Nah, kawasan industrinya ini yang di *protect* oleh negara, *gitu loh*. Jadi, ini kan yang harus di *anukan*. Jadi, supaya ke depan seperti yang terjadi sekarang ini, industri hulu ini kan di Indonesia banyak swasta. Kemarin, kan dengar ini benar atau enggak, Virtue Dragon itu kan ada di media itu, bangkrut, karena banyak utang di Cina. Lah, ini kalau nanti tidak di *protect* oleh negara, maka industri hilirnya kan akan mati, karena di sini misalnya dari negara Cina itu tidak mau menyuntik anggaran untuk Virtue Dragon itu, *gitu loh*. Jadi, ini *kan* harus kita kaji lah ke depan ini, karena pemerintahan ke depan ini kan, kita ini hilirisasi yang diutamakan dari sumber-sumber daya alam kita yang kita miliki.

Dan *insyaallah*, Pak Rosan ini *kan* akan menjabat lagi selama 5 tahun dan mudah-mudahan ini banyak anggota kita yang terpilih, ini kan bisa ketemu, bisa saling *sharing* dan mengisi.

Saya ini berharap industri hulu yang dicita-citakan Pak Prabowo, hilirnya ini bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, Pak. Dan saya ke depan, Pak Rosan dalam memperjuangkan kepentingan apa, anggaran di Kementerian BKPM ini harus agak *ngotot*, karena ini Bapak adalah sebagai ujung tombak investasi yang masuk ke negara kita itu.

Itu *aja*, Pak, dari saya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Dari anggota, habis.

Dari Pimpinan, Pak Sarmuji.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Martin. Sedikit saja.

Pertama, pertama, kami ingin sedikit menegaskan tentang peran Kementerian Investasi ini. Kenapa mesti saya tegaskan? Karena, berdasarkan keprihatinan sebenarnya, Pak, Pak Menteri, anggarannya ini terlalu kecil untuk sebuah tujuan besar yang diinginkan. Kita semua mafhum, investasi itu sangat penting. Kita memiliki APBN yang jumlahnya tidak besar, sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan kita. Kalau kita mau meng-*generate* ekonomi di luar APBN, hanya ada dua sumber utama yang memungkinkan. Pertama, dengan memperbesar defisit, artinya

ada hutang luar negeri tambahan. Kedua, dengan investasi dari luar yang kita perlukan untuk memutar roda perekonomian.

Hutang luar negeri, orang sering kritik. Kita mau menambah defisit sedikit saja, itu kritikan tentu sangat deras ke kita, karena kita semua mafhum, kalau hutang luar negeri kita tambah, beban bunganya juga tidak mudah untuk bisa kita selesaikan dalam masa-masa ke depan. Belum lagi kalau kita *ngomong* tentang tanggungan terhadap hutang bagi anak cucu kita. Karena hanya ada dua sumber hutang luar negeri dan investasi, sudah selayaknya investasi ini menjadi prioritas utama kita dan kalau itu menjadi prioritas, tentu harus didukung oleh anggaran yang memadai.

Sayangnya, anggaran di Kementerian Investasi ini jauh dari kata memadai. Jadi, kalau kita dibatasi untuk menambah defisit, menambah hutang luar negeri, lalu kita juga dibatasi juga untuk menambah investasi, maka bisa dipastikan roda perekonomian kita sulit untuk berkembang lebih tinggi lagi. Apalagi kalau ini berkaitan dengan target Pak Presiden terpilih di masa depan, pertumbuhan ekonomi sampai 8%.

Kalau tidak dilonggarkan hutangnya, tidak juga dilonggarkan investasinya, tentu ini menjadi persoalan yang sangat serius. Belum lagi kita kalau *ngomong* kompleksitas tenaga kerja kita, usia produktif kita, bonus demografi kita yang juga harus tertampung melalui lapangan kerja. Tentu ini menimbulkan problem yang sangat kompleks kalau investasi tidak didorong.

Karena itu, kami ingin memberikan *support* moral, senyampang ini masih dalam kepemimpinan transisi. Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan. Jadi, saya memberikan *support* moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai, terutama nanti kalau ada APBN perubahan.

Yang kedua, kami sudah bermitra dengan Kementerian Investasi selama 5 tahun ini, meskipun Pak Rosan baru menggantikan Menteri yang sekarang di Menteri ESDM, Pak Ketum saya. Tapi dengan rekan-rekan di Kementerian, dengan Deputi, dengan Eselon II, dan seterusnya, kami sudah bermitra. Dan barangkali ada salah kata, salah tindakan dari kami, secara pribadi maupun sebagai Pimpinan Komisi VI DPR RI, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jalinan kemitraan kita tetap terjaga, entah saya masih di Komisi VI atau tidak, nanti mudah-mudahan masih bisa bersambung persaudaraan.

Terima kasih, Pak Martin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Walaikumsalam,

Makasih, Pak Sarmuji.

Saya hanya sedikit menambahkan, Pak, terkait anggaran. Karena pada raker yang lalu, beberapa raker yang lalu ketika masih Pak Bahlil di sini, dengan turunnya anggaran, *kan* Pak Bahlil menurunkan target investasi. Nah, apakah setelah Bapak sekarang menjadi Menteri Investasi, Bapak masih bisa mencapai target itu, atau memang menurut Bapak, target dari Pak Bahlil itulah yang masih rasional dengan adanya penurunan anggaran ini?

Jadi, ini supaya, apa, dinyatakanlah oleh Pak Menteri terkait dengan target investasi. Jangan nanti kemudian dipersalahkan Kementerian Investasi tidak bisa mencapai target, padahal karena anggarannya turun.

Saya pikir itu dari saya, saya kembalikan ke Pak Menteri pada raker ini. Ini raker terakhir di periode ini, Pak.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI RI/KEPALA BKPM RI (ROSAN PERKASA ROESLANI):

Terima kasih.

Pimpinan, dan juga kepada Anggota Dewan yang terhormat,

Atas *support* moralnya kepada Pimpinan, kepada dukungan, dan juga kepada apa, kerja samanya selama ini dan izinkanlah saya mungkin, apa, tidak menjawab satu per satu, tetapi pada intinya memang kalau kita lihat, investasi ya sebetulnya akan menjadi salah satu ujung tombak untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Apalagi kita ketahui bersama target dari presiden terpilih, Pak Prabowo adalah untuk mencapai 8%.

Ya, harapannya tentunya dari kami, dengan dukungan dari Pimpinan dan juga Anggota Dewan terhormat Komisi VI, anggaran itu bisa di, apa, bisa ditingkatkan, dari yang 600 triliun ini menjadi, apa, menjadi tambahan kurang lebih 800 triliun, sehingga, 800 miliar, 800 miliar, mohon maaf, 800 miliar, sehingga, ke depannya memang target yang tadinya dicanangkan, kurang lebih 1.905 triliun pada tahun 2025 ini, dapat kami capai.

Ya, memang kami akan mencoba dengan anggaran yang ada ini, tentunya kami akan me, apa, me-*review* ulang dan juga tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk program-program yang memang sudah dicanangkan pemerintah untuk bisa kami capai, ya.

Tetapi, tentunya yang tadi disampaikan juga adalah penyerapan tenaga kerja yang bisa terdampak, sedangkan itu adalah salah satu PR kita yang utama, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi,



kembali lagi merupakan , apa, saya bilang, jembatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, yang berkualitas, dan berkesinambungan. Dan ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri apabila anggaran kami ini menurun cukup signifikan, sehingga ya bisa berdampak kepada pencapaian-pencapaian target ke depannya.

Tetapi, ya, intinya nanti sambil berjalan, harapannya kembali lagi dengan dukungan dari Komisi VI dan dari para Pimpinan dan Anggota Dewan terhormat, itu bisa ditingkatkan anggaran itu ke depannya. Dan apa ya, di saat bersamaan tentunya ya kita akan terus meningkatkan juga, apa, dan melihat juga perbandingan dengan negara-negara lain di, pertama di ASEAN ini, bagaimana kita dengan anggaran terbatas ini tetap meningkatkan apa pelayanan kami, tetap meningkatkan rencana kerja kami, dan kembali lagi kita lihat skala-skala prioritas apa dengan anggaran yang ada yang harus kita tetap pertahankan, tetap kita dahulukan, sehingga dampak dari penurunan anggaran ini tidak terlalu signifikan terhadap target-target yang kami ingin capai.

Tetapi intinya, ya kita akan terus berusaha semaksimal mungkin, baik dari segi program kerja maupun dari sisi penambahan anggaran. *Inshaallah* ini bisa tercapai ke depannya dengan baik.

Dan juga dalam kesempatan ini, izinkanlah saya juga atas nama saya pribadi dan juga atas nama Kementerian Investasi, ingin mengucapkan sekali lagi, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena walaupun saya relatif hanya di ujungnya saja, tetapi saya mendapatkan apa masukan, *inputan* dari teman-teman, dari Pak Wamen, Pak Ses, Pak Deputi, Eselon I, Eselon II, dan yang lainnya bahwa selama ini dukungan dari Komisi VI ini sangat-sangat luar biasa dan itu juga yang membuat kami bisa mencapai target-target yang dicanangkan oleh kami sendiri dan juga oleh pemerintah, karena dukungan yang sangat kuat, sinergi yang sangat baik dengan Komisi VI. Ya, tentunya harapan ini, terus bisa, bukan hanya berlangsung, tapi terus meningkat ke depannya.

Dan juga dalam kesempatan ini, kami kiranya juga meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang secara ucapan maupun perbuatan. Tetapi, bisa kami pastikan bahwa itu karena faktor *ketidaksengajaan* dari pihak kami.

Tapi sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan juga kepada Anggota Dewan yang terhormat atas kerja samanya yang sangat luar biasa kepada kami.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Walaikumsalam,

Kami juga dari Komisi VI mengucapkan terima kasih ke seluruh jajaran Kementerian Investasi dan BKPM atas sinerginya, juga perhatiannya terhadap permasalahan, aspirasi, yang sering kami temui ketika kami berhadapan dengan konstituen kami.

Komisi VI ini berkoordinasi dengan BKPM, khususnya juga terkait dukungan terhadap UMKM dan lain sebagainya. Selama ini dari BKPM memberikan perhatian, bagaimana supaya perekonomian masyarakat di dapil kami masing-masing bisa berjalan dengan lebih baik.

Sekarang, kita masuk ke *draft* kesimpulan.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi Kepala BKPM RI tentang penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, Kamis 12 September 2024.

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI Tahun Anggaran 2025 sesuai surat Badan Anggaran DPR RI, Nomor: B/11277/AG.05.02/09/2024, tanggal 10 September 2024, perihal: penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681.880.285.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per program paling lambat tanggal 12 September 2024 untuk diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.
2. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Setuju? Ya, dua-duanya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih kepada Pak Menteri Investasi, Pak Wamen, Pak Sesmen, dan seluruh jajaran.

Sebelum menutup rapat, karena ini rapat terakhir di periode ini, izinkan saya menyampaikan pantun.

*Ke pasar beli alpukat
Rasanya segar membuat kenyang
Semoga investasi semakin meningkat,
Walaupun anggaran BKPM masih berjuang*



*Jalan-jalan ke Angkor Wat,
Pulangnyanya membawa berkat
Pak Rosan memang baru menjabat
Semoga tetap terus menjabat*

Baik, terima kasih.

Dengan demikian, izinkan saya menutup rapat pada hari ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.43 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

